



KR-Antara/Yusuf Nugroho

OJEK KAMBING: Penyedia jasa ojek kambing memasukkan kambing ke dalam gerobak di Pasar Hewan Jurang, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (6/7). Menjelang Hari Raya Idul Adha, jasa ojek pengantar kambing dari pembeli sampai ke tempat tujuan dengan upah Rp 20.000-Rp 50.000/ekor tergantung jarak tempuh itu peminatnya naik hingga 50 persen dibanding hari biasa.

TINGKATKAN LAYANAN KB PASCAPERSALINAN Efektif Turunkan Prevalensi Stunting

JAKARTA (KR) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendorong para Penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan layanan KB bagi akseptor pascapersalinan. Sebab, menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, layanan KB pascapersalinan efektif untuk menurunkan prevalensi stunting.

Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara Konsolidasi Implementasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 yang diikuti 34 Kepala Kantor Perwakilan BKKBN dan jajaran di seluruh Indonesia, Selasa (5/7).

Acara yang digelar hybrid, luring dan daring dari Hotel Santika Medan, Sumatera Utara ini merupakan rangkaian kegiatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29.

"Kalau sampai pascapersalin tidak KB, maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pascapersalinan sebetulnya akseptor baru akan tercapai. Artinya unmet neednya turun, akseptor barunya ada juga, stuntingnya turun. Jadi sekali kerja dapat tiga kalau mau grebek pasca-

persalinan," kata Hasto.

Menurut Hasto, lebih mudah mengajak ibu pascapersalinan memasang kontrasepsi. Sebab, secara psikologis seorang ibu yang baru melahirkan tidak ingin langsung punya anak lagi.

Karena itu, strategi komunikasi yang baik menjadi pintu gerbang bagi BKKBN untuk mensukseskan Program Bangsa Kencana.

"Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi yang jawab iya 29 persen, sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa," kata Hasto.

Hasto juga meminta jajaran Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial. "Bapak dan ibu, bisa blow up di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar," kata Hasto. (Ati)-f

PERBAIKI RANTAI DISTRIBUSI MIGOR

Minyakita Rp 14.000 Perliter Beredar

JAKARTA (KR) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng (migor) sederhana dengan merek Minyakita yang dijual dengan harga Rp 14.000 perliter untuk memudahkan masyarakat mendapatkan stok minyak goreng.

"Hari ini kita meluncurkan Minyakita. Tentu kita bersyukur dapat meluncurkan minyak goreng rakyat yang dikemas secara sederhana ini," kata Mendag saat menghadiri peresmian tersebut di Jakarta, Rabu (6/7).

Mendag menyampaikan, dalam persoalan minyak goreng, pihak pengusaha maupun Pemerintah menyadari rantai distribusi minyak goreng curah perlu diperbaiki. Untuk itu, dengan hadirnya Minyakita,

Mendag berharap pendistribusian minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat lebih lancar, melalui rantai distribusi seperti Si Gurih dan Warung Pangan.

"Bottleneck sudah lancar, sehingga di Jawa-Bali harga sudah Rp 14.000 perliter. Memang di Papua, Tarakan, itu ada yang masih Rp 20.000, masih tinggi. Kita rebusan, dan Alhamdulillah sekarang sudah ada kemasan sederhana, bahkan ada yang pakai botol,"

ujar Mendag.

Menurut Zulkifli, bagi masyarakat yang berada di Indonesia Timur, yakni Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, dimana pendistribusian minyak goreng curah terkendala logistik, akan teratasi dengan kemasan sederhana yang baru diluncurkan. "Tentu kemasan sederhana ini akan lebih mudah untuk didistribusikan ke Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan daerah Indonesia Timur lainnya," tukas Mendag.

Zulkifli menyampaikan, nantinya Minyakita diharapkan dapat masuk ke warung-warung, pasar tradisional, minimarket, hingga supermarket. Mantan Ketua MPR itu juga menambahkan, minyak curah merupakan instrumen dalam negeri, dimana harga Tandani Buah Segar (TBS) sawit sangat terkait dengan kelancaran ekspor.

"Kalau ekspornya lancar, pabrik kelapa sawit (PKS) itu tangkinya kosong. Kalau tangkinya kosong, bisa membeli sawit rakyat. Kalau pembeli sawit rakyat sudah banyak, maka hukum pasar, harga akan naik sedikit demi sedikit, sehingga petani senang," tambah Zulkifli. Plt Direktur Jenderal Perda-

gangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syaileandra menjelaskan, produksi migor kemasan sederhana dengan merek Minyakita didukung dua perusahaan, tujuh lainnya segera menyusul.

"Minyakita yang pada hari ini, baru didukung dua perusahaan, yaitu PT Best Group dan PT Panca Nabati Perkasa. Segera menyusul, tadi pagi kami tandatangi ada tujuh perusahaan lagi yang akan mengemas minyak goreng kemasan rakyat ini," ujar Syaileandra.

Syaileandra menyampaikan, Minyakita yang dijual Rp 14.000 perliter itu diluncurkan sebagai inisiasi pendistribusian minyak goreng dalam rangka

Domestic Market Obligation (DMO) dengan menggunakan kemasan. "Selain curah, kita juga menggunakan kemasan sebagai cara untuk diperhitungkan dalam DMO," ujar Syaileandra.

Minyakita merupakan merek dagang yang dimiliki Kemendag dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Syaileandra menyebut, merek Minyakita dapat digunakan oleh produsen minyak goreng siapa saja dan oleh pengemas minyak goreng dengan masa berlaku empat tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan izin edar maupun aturan BPOM. (Ant/San)-f

KEMENDAGRI MINTA KOMITMEN PEMDA

Segera Selesaikan Peta Batas Desa

JAKARTA (KR) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta komitmen bersama Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan peta batas desa dengan melibatkan Perguruan Tinggi dan swasta.

"Meminta komitmen bersama untuk menyelesaikan peta batas desa sesuai dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021, penyelesaian batas desa secara kolaboratif dengan melibatkan pihak swasta atau Perguruan Tinggi terkait, pembentukan tim kerja untuk melaksanakan clearing house permasalahan penetapan dan penegasan batas desa," jelas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Yusharto Huntuyungo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/7).

Perpres No 23 Tahun 2021 itu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksa-

naan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Menurut Yusharto Huntuyungo, Perpres itu mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai 2021 hingga 2023. Adapun Peraturan Presiden tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan dari tahun 2021 sejumlah 10 provinsi, 12 provinsi pada tahun 2022 dan 11 provinsi pada 2023.

Hal itu juga ditegaskan Yusharto dalam Workshop Pengesahan Batas Desa yang digelar di Jakarta. "Mari tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Peraturan Presiden tersebut," harapnya.

Yusharto mengungkapkan, dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa untuk memenuhi aspek teknis, Kemendagri melalui

Ditjen Bina Pempdes sebagai wali data peta batas administrasi desa yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Pasal 401 dan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penegasan batas termasuk cakupan wilayah dan penentuan luas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan pada perhitungan teknis yang dibuat oleh lembaga yang membidangi informasi geospasial.

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Aspek teknis dimaksud pelaksanaannya difasilitasi dan disupervisi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) mengacu UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. (Ant/San)-f

TARGET DITJEN PERKERETAAPIAN 2030

Bangun Jaringan KA 10.524 Km

JAKARTA (KR) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menargetkan pembangunan jaringan kereta api di Tanah Air sepanjang 10.524 kilometer pada tahun 2030.

"Telah ditetapkan visi perkeretaapian nasional sampai tahun 2030 sepanjang 10.524 km, termasuk KA perkotaan 3.755 km," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulkifri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (6/7).

Zulkifri mengatakan, panjang lintasan saat ini berada pada kisaran 7.032 km, seiring dengan pembangunan yang terus dilakukan hingga tahun 2024 ditargetkan dapat terbangun 7.451 km.

Menurutnya, target tersebut ada pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 Tahun 2020 dimana terdapat sejumlah upaya untuk mengembangkan kereta api sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS).

Ia menjelaskan, beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memenuhi RIP-

NAS antara lain membangun jaringan KA di Pulau Sumatera dan Sulawesi, pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi lintas utama Jawa, dan pengoperasian KA kecepatan tinggi di Pulau Jawa. Kemudian, tersedianya sarana KA penumpang sebanyak 2.839 lokomotif dan 34.178 kereta. Selanjutnya, sarana KA barang sebanyak 2.475 lokomotif dan 48.364 gerbong.

Adapun pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut mencapai Rp 853 triliun, dimana skema pembiayaan alternatif sebesar 68 persen dan penggunaan APBN sebesar 32 persen. "Hal tersebut diupayakan untuk mewujudkan perkeretaapian kompetitif, terintegrasi, dan responsif terhadap perkembangan," ujarnya.

Ditambahkan, untuk proyek utama hingga tahun 2024, Ditjen Perkeretaapian menargetkan pembangunan KA Makassar-Parepare, Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dan peningkatan kecepatan KA Jakarta-Surabaya Tahap I yaitu lintas Jakarta-Semarang. (Ant/Imd)-f

PANTAU PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

Pemkab Temanggung Terjunkan 222 Petugas

TEMANGGUNG (KR) - Pemkab Temanggung menerjunkan ratusan petugas untuk memantau dan memeriksa penyembelihan hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1443/2022. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto mengatakan, petugas yang diterjunkan 222 orang terdiri dokter hewan, penyuluh dan inseminator.

"Secara garis besar mereka akan memeriksa ante mortem dan post mortem pada hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443/2022," kata Budi Nuryanto, Rabu (6/7).

Ia menjelaskan, pada pemeriksaan ante mortem antara lain bertujuan mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular dan zoonosis atau tanda-tanda yang menyimpang. Tujuan lain, mencegah kontaminasi dari hewan atau bagian dari hewan yang menderita penyakit kepada petugas, peralatan dan lingkungan.

"Pemeriksaan juga untuk menentukan status hewan dapat dipotong, ditunda atau tidak boleh dipotong. Selain mencegah pemotongan hewan betina produktif," tegasnya. (Osy)-f

Kepala Bidang Peternakan Temanggung Mukhlis mengatakan, pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih. Pemeriksaan dilakukan setelah penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan jeroan.

"Pemeriksaan ini untuk jaminan bahwa karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan aman dan layak dikonsumsi. Selain mencegah beredarnya bagian/jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit," ujarnya.

Pemeriksaan post mortem ini cukup sederhana, misalnya jika ditaburi garam jeroan keluar cacing, langsung dituntukan jeroan tidak layak konsumsi. Harapannya, dengan diterjunkan petugas itu daging kurban yang beredar di masyarakat sebagai daging aman, sehat, utuh dan halal untuk dikonsumsi.

Mukhlis mengatakan, petugas terjun di 20 kecamatan. Mereka akan mendata lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Berdasarkan prakiraan di wilayah Temanggung ada 13 ribu kambing yang akan disembelih pada tahun 2022, sedangkan sapi mencapai 1,200 ekor. (Osy)-f

YOGYA (KR) - Ratusan mahasiswa dari sejumlah Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berunjukrasa di depan Gedung DPRD DIY, Malioboro, Yogya, Rabu (6/7). Sebelumnya mereka berkumpul di Taman Parkir Abu Bakar Ali dan kemudian berjalan kaki menuju Gedung DPRD DIY.

Di depan gedung wakil rakyat, mereka secara bergantian berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan. Sebagian peserta membawa sejumlah spanduk mewakili tuntutan mereka. Seperti 'Cukup skincaremu yang mahal, pendidikan jangan', 'Hidup cuma numpang ketawa' dan lain-lain. Mereka juga menyertakan tagar #semuabisakena.

Sejumlah tuntutan disampaikan baik kepada Pemerintah Pusat maupun

TUNTUT TRANSPARANSI RCUHP

Forum BEM DIY Unjukrasa di DPRD DIY

Pemerintah Daerah. Antara lain tuntutan kepada Presiden dan DPR RI untuk membuka draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru secara transparan serta melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan RKUHP. Mereka juga menuntut penghapusan dan pencabutan pasal-pasal yang memuat materi bermasalah. Terutama yang

mengancam kebebasan berdemokrasi dan melanggar hak asasi manusia.

"Kami menuntut kepada Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berdemokrasi dan berekspresi baik di muka umum maupun media lainnya," kata Abdullah selaku Kordum Aksi.

Hal lain yang mereka serukan antara lain menolak segala kebijakan yang berorientasi pada komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan, menuntut kestabilan harga bahan pokok, hingga mendesak Pemda DIY untuk segera menyelesaikan permasalahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dan juga menuntut kepada Polda DIY untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di DIY.

Aksi mahasiswa ini ditemui Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. Sejumlah perwakilan demonstran memberikan Huda setangkai bunga. "Apa yang menjadi tuntutan teman-teman ini akan langsung dikirimkan ke pusat hari ini juga. Resmi dengan kop DPRD DIY dan saya tandatangi langsung," ujarnya. (Awh/Bro)-f



KR-Atiek Widayastuti H

Aksi mahasiswa di depan Gedung DPRD DIY.